TUGAS FILSAFAT PANCASILA
PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA

OLEH
JHONNALTHO WORUMBOI
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
KAMPUS MADIUN
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

- A. Politik di Indonesia
- B. Perkembangan politik di Indonesia
- C. Politik Indonesia saat ini
- D. Sikap masyarakat terhadap perpolitikan di Indonesia
- E. Pendapat Aristoteles terhadap politik
- F. Gotong royong

BAB III PENUTUP

- A. Abstrak
- B. Kesimpulan
- C. saran

ABSTRAK

Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan perlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya order Baru yang dipimpin presiden suharto dan mulai periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun politik uang dimana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik.

Persoalan tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi penuh (saat ini – berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit – Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi cacat). Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami sakit tumbuh.

Pandangan politik di Indonesia saat ini adalah bermacam-macam. Berbagai peristiwa yang menyangkut keadaan politik yang ada di negeri ini semakin menjadi sorotan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemerosotan kualitas politik tersebut dapat dilihat dari banyaknya peristiwa yang nampaknya mengganggu kestabilan nasional.

Setelah di bawah pemerintah otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pemburuan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Presiden Reformasi. Tak hanya ditandai oleh perubahan struktural (misalnya korupsi, kemiskinan dan pengelompokan modal di kalangan atas).

Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberikan kondisi politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru dilupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk mendapat menggulingkan. Kondisi politik di Indonesia sangatlah memperhatikan. Kondisi tersebut sangatlah memperhatikan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Tidak melihat rambu-rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu pikiran dan materi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan perlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya order Baru yang dipimpin presiden suharto dan mulai periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun politik uang dimana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik.

Persoalan tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi penuh (saat ini – berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit – Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi cacat). Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami sakit tumbuh.

Kondisi politik Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia saat ini serta ikhtisar bab-bab penting dalam sejarah politik Negara ini. Meskipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang politik di Indonesia, agaknya pada peraturan hanya tertulis di atas kertas saja dan juga istilah peraturan dibuat untuk dilanggar masih menjadi paham yang terus dan berkembang hingga sampai kapan akhirnya.

Tidak tau sampai kapan kondisi politik seperti ini akan terus berlangsung, ketika akan diadakan pemilu semua calon legislatif, calon anggota DPR, calon anggota DPRD serta calon presiden dan calon-calon lainnya berbondong-bondong datang ke rakyat miskin yang sebelumnya tak pernah sekali masuk ke daerah kumuh.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perkembangan politik di Indonesia
2. Bagaimana politik Indonesia saat ini
3. Apa tanggapan dan sikap masyarakat terhadap politik Indonesia saat ini

C. Tujuan

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan politik di Indonesia
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana politik Indonesia saat ini
3. Untuk dapat mengetahui Apa tanggapan dan sikap masyarakat terhadap politik Indonesia saat ini

Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan perlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya order Baru yang dipimpin presiden suharto dan mulai periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adi. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun politik uang dimana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik.

Persoalan tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi penuh (saat ini – berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit – Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi cacat). Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami sakit tumbuh.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik di Indonesia

Pandangan politik di Indonesia saat ini adalah bermacam-macam. Berbagai peristiwa yang menyangkut keadaan politik yang ada di negeri ini semakin menjadi sorotan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemerosotan kualitas politik tersebut dapat dilihat dilihat dari banyaknya peristiwa yang nampaknya mengganggu kestabilan nasional, contoh peristiwa itu adalah sebagai berikut.

1. Semakin banyak kader partai yang tertangkap korupsi
2. Semakin banyaknya pejabat yang menduduki kursi terhormat terjerat korupsi
3. Pemilihan gubernur yang dirusak oleh pembelian suara hingga harus terjadi pengulangan pemilu
4. Jika pegawai tidak condong ke partai tertentu maka jabatannya menjadi taruhan. Sebenarnya Indonesia menganut sebagai pandangan politiknya, setelah rezim orde

lama digantikan oleh orde baru, lalu muncullah reformasi yang digadang-gadang dapat memperbaiki kehidupan rakyat. Namun, hingga kini tujuan tersebut belum dapat terealisasi dengan sempurna karena proses dengan demokrasi yang berkembang menjadi tidak murni lagi dan juga paham patrimonialisme dan otoriter masih berkembang kuat di dalam pelaku politik.

Meskipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang politik di Indonesia, agaknya peraturan hanya tertulis di atas kertas saja dan juga istilah peraturan dibuat untuk dilanggar masih menjadi paham yang terus berkembang hingga sampai kapan akhirnya.

Tidak tau sampai kapan kondisi politik seperti ini akan terus berlangsung, ketika akan diadakan pemilu semua calon legislatif, calon anggota DPR, calon anggota DPRD serta calon presiden dan calon-calon lainnya berbondong-bondong datang ke rakyat miskin yang sebelumnya tak pernah sekali masuk ke daerah kumuh.

Mereka sontak membagi-bagikan uang, sembako serta menaburkan selangit janji yang akan diberikan kelak mereka terpilih. Tak sampai di situ usaha mereka baliho dan gambar di pasang besar-besarnya hingga memenuhi sepanjang jalan mata memandang. Namun, ketika mereka mendapatkan jabatan yang diinginkan apakah nasib si miskin dapat terangkat? Kebanyakan mereka lupa dan segera berusaha mengumpulkan kembali modal yang mereka keluarkan dan segera lupa dengan janji manis yang mereka tebar.

B. Perkembangan politik di Indonesia

1. Masa prakolonial Indonesia

Sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Entitas ini berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan di mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri dalam diri seorang yang mempunyai ketrampilan tertentu dan kharisma dan juga menyatakan diri sebagai seorang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja.

2. Masa penjajahan Indonesia

Kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan yaitu pandangan rempa-rempa adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan Portugis dan khususnya orang Belanda, berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini serta mulai menciptakan karangan politik dan batas-batas baru.

3. Orde Lama Soekarno

Soekarno, presiden pertama Indonesia adalah ikon perjuangan nasional yang melawan para penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah Negara baru yang masih memiliki trauma dari masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Ternyata polisi generasi muda yang tidak punya pengalaman sebelumnya ini kesulitan membimbing Negeranya. Keadaan itu memuncak dalam kekacauan pada pertengahan tahun 1960.

4. Orde Baru Suharto

Suharto, presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960an di tengah pergolakan yang ada. Pemerintah Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun dan pemerintah itu di tandai oleh perkembangan ekonomi (yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan) tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun, ketika ekonomi domestik dasar legitimasi kekuatannya –runtuh pada tahun 1990an, Suharto cepat kehilangan kekuasaan.

5. Reformasi Indonesia

Setelah di bawah pemerintah otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pemburuan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan

dan politik kepada masyarakat Indonesia. Presiden Reformasi. Tak hanya ditandai oleh perubahan struktural (misalnya korupsi, kemiskinan dan pengelompokan modal di kalangan atas).

Mudah-mudahan masyarakat kita mulai pandai dan tidak lagi terpengaruh dengan janji palsu dan tidak lagi menjadi murah suara dengan uang Rp20.000 semoga informasi pandangan politik di Indonesia saat ini bermanfaat

6. Kabinet Indonesia sekarang

bagian ini menampilkan daftar anggota kabinet presiden Joko Widodo yang dinamai kabinet kerja, yang di resmikan pada tanggal 27 Oktober 2014, dan akan memerintah sampai dengan tahun 2019, saat pemilu baru pada tahun 2019 karena konstitusi memperbolehkan kepresidenan sampai dua kali masa jabatan (masing - masing lima tahun).

C. Politik Indonesia saat ini

Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberikan kondisi politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru dilupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk mendapat menggulingkan. Kondisi politik di Indonesia sangatlah memperhatikan. Kondisi tersebut sangatlah memperhatikan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Tidak melihat rambu-rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu pikiran dan materi.

Begitu juga dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi kesengsaraan para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada.

Para politikus ini menampakkannya masih terlalu sibuk. Padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka.

Kita semua bisa gejala mati rasa penyelenggara Negara misalnya dalam soal pembelian mobil mewah untuk para menteri Kabinet Indonesia bersatu II atau juga pembangunan pagar istana presiden yang menelan biaya puluhan miliaran rupiah. Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik

Karena di saat yang sama kemiskinan masih mengaruh biru Indonesia (jumlah orang miskin di Indonesia per Maret berdasar BPS sebanyak 31,02 juta. Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah suatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disesatkan oleh Negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat dengan baik, bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan, jika hal ini terus dibiarkan maka seperti bom yang harus dipadam. Maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi pemerintah terus seperti ini maka tidak mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan Negara. Akibatnya masyarakat akan cenderung apatis terhadap kondisi Negara. Karena kestabilan Negara juga dipengaruhi oleh kestabilan politik yang ada di Negara tersebut. Apabila gejolak politik di suatu Negara terus menerus berkejolak maka tidak mustahil jika terjadi peperangan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban seperti Negara-negara di timur tengah .

D. Sikap Masyarakat terhadap dunia politik di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi Indonesia sedang berjalan menuju demokrasi yang di wasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemenang kekuasaan tinggi, semakin terlihat jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak maju di Indonesia.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan juga peran aktif secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah

Dengan demikian partisipasi politik erat kaitnya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya di perintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggara pemerintah “Budiarto (2009 :367)

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian secara aktif, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses membentuk kebijakan umum. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagian di tetapkan dengan undang-undang”. Dan diatur secara jelas dalam undang – undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak – hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih hak sama di hadapan hukum dan pemerintah, hak pendapat keadilan.

Sedangkan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, adalah merupakan salah satu implementasi nilai – nilai demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan nilai kebebasan dimana masyarakat di beri kebebasan penuh untuk memilih, dan mendukung calon yang di inginkan. Disisi yang lain masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan. Tingginya partisipasi atau peran serta masyarakat, dianggap sebagai salah satu hal yang positif. Dalam konteks pemikiran ini, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, ditunjukkan pada sikap pada warga Negara untuk mengikuti memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting . Karena demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah atau kekuasaan di tangan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Di sertai nilai yang di kandung dalam demokrasi, yaitu kebebasan dan kesetaraan.

E. Pendapat Aristoteles terhadap politik

Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah makhluk politik. Manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan kodrati tinggi bersama yang lain. polis (dalam system hidup bersama). Jadi makhluk politik sama sekali bukan memaksudkan kecenderungan untuk berpolitik dalam artian sekarang ini, melainkan

penggagas bahwa kesempurnaannya diraih dan dikejar dalam tata hidup bersama dalam polis. Negara berasal dari kodrat manusia. Mula-mula manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia-manusia senantiasa membangun kesatuan. Kesatuan pertama ialah kesatuan antara laki-laki dan perempuan (union of male and female). Polis atau suatu sistem hidup bersama ada secara natural karena keluarga-keluarga membangunnya. Polis dengan demikian adalah himpunan keluarga-keluarga yang membentuk sistem sedemikian rupa sehingga masing-masing individu tecukupi kebutuhannya. Tujuan yang digariskan polis Aristoteles ialah untuk mengejar the good life, dan tak sekedar pemenuhan kebutuhan fisik anggotanya. Kebijakan praktislah yang merupakan senjata paling penting dan paling mungkin untuk mewujudkan the good life(keseimbangan umum-bonum commune). Bonum commune inilah cetusan kesempurnaan manusia. Politik bukan lapangan keutamaan manusiawi . Nartural/Kodrat kehidupan keutamaan berbeda dengan natural/kodrat kehidupan politik. Keduanya tidak sepadan/ kompatibel. Politik memiliki keutamaannya sendiri. Keutamaan manusiawi berbeda dengan keutamaan politik (yang perlu dimiliki oleh setiap penguasa yang tidak ingin kehilangan takhtanya). Keutamaan dalam lapangan politik adalah aneka kecerdikan yang dimaksudkan untuk menaklukkan musuh, memperdaya para pengkhianat, menjaga kesatuan dan keutuhan rakyatnya, membelah dan memperkokoh takhta kekuasaannya.

F. GOTONG ROYONG

Gotong royong adalah fama yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara – saudara ! kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat soekardjo: satu *karyo*, satu *game*. Marilah kita menyelesaikan *karyo*, *game* , pekerjaan awal ini bersama-sama! Gotong royong adalah pembanting tulang bersama, pemeresan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama, awal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, *holopis kantul baris* buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong! (sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 82)”

Soekarno menyadari bahwa prinsip gotong royong ini di asalakan dari paham jawa, di mana semua bekerja sama bekerja sama untuk menyelesaikan “*game* dan ” *karyo*” bersama. Soekarno mengutip perkataan soekardjo untuk menjelaskan makna gotong royong. Siapakah soekardjo menjadi salah satu peserta dalam sidang ini dan ahli di bidang redaksional, sehingga pantas jika soekarno mengutip perkataannya. Definisi gotong royong yang di kemukakan soekardjo pun berupa terminologi jawa; yakin “*karyo*” dan “*game* “

Soekarno di titik ini hendak menyakinkan para peserta sidang akan kekukuhannya untuk menggali dasar Negara dari bumi Indonesia sendiri. Gotong royong adalah khas Indonesia. Darmawan (2005: 20) di titik ini berpendapat bahwa soekarno ingin supaya para bapak pendiri bangsa diikat oleh pemahaman

bersama bahwa Negara Indonesia diasalakan dari prinsip khas Indonesia sendiri dan didirikan demi kepentingan semua waraga, sehingga semua bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa.

Soekardjo, pada sidang yang kedua (yang membahas tentang bentuk Negara), justru menggarisbawahi paham gotong royong yang di usung oleh soekarno. Gotong royong dalam segala hal. Maka bentuk gotong royong tidak saja buat sebelum perang tetapi juga buat sesudah perang, sebab bentuk gotong royong adalah bentuk yang cocok dengan tabiat jiwa ketimuran yang asli (secretariat Negara republik Indonesia, 1995; 118-119)”

BAB II

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia menganut reformasi sebagai pandangan politiknya, setelah rezim orde lama digantikan oleh orde baru, lalu muncullah reformasi yang digadang-gadang dapat memperbaiki kehidupan rakyat. Namun, hingga kini tujuan tersebut belum dapat terealisasi dengan sempurna karena proses demokrasi yang berkembang menjadi tidak murni lagi dan juga paham patrimony dan otoriter masih berkembang kuat di dalam pelaku politik. Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat

justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Masyarakat memandang elite politik tidak mengalami perubahan yang jelas. Hal ini bisa dari masyarakat yang menjadi korban kebijakan politik yang sedang berkuasa. Ada sebagian masyarakat yang sangat mengerti sekali dengan politik tetapi pemilu tak ubahnya hanya sandiwara politik karena hakikatnya, pemilu hanya akan menguntungkan secara politik dan ekonomi kepada elit politik. Golput pun muncul karena berdasarkan bahwa keberadaan pemilu dan aktivitas memilih tidak akan berdampak lebih baik pada diri pemilih. Hal ini terjadi ditengah masyarakat yang terjebak pada apatisme. Kecenderungan ini muncul ketika norma-norma sosial yang selama ini disepakati dan dijabarkan dalam suatu masyarakat mengalami kelonggaran, kegoyahan, dan kehilangan fungsinya yang efektif. Golput bukanlah pilihan tepat dan cenderung mendorong masyarakat menjadi apatis. Kondisi ini bisa menciptakan rendahnya legitimasi pemerintah serta mendorong

munculnya masyarakat yang antipati (ketidaksukaan untuk sesuatu atau seseorang), terhadap perkembangan politik.

**B. Saran **

Rakyat Indonesia belum merasakan kinerja yang baik dari pemerintah Indonesia, malahan membuat mereka memandang buruk terhadap politik itu sendiri. Selain itu, para generasi muda Indonesia haruslah diperkenalkan dengan politik yang sebenarnya, agar dikemudian hari mereka dapat menjadi generasi baru yang lebih bertanggungjawab. Sehingga kondisi bangsa ini tidak terus terpuruk akibat politik tidak bertanggungjawab para pejabat sekarang. Sudah seharusnya kita membenai bangsa ini karena bila kondisi seperti ini terus di budayakan, maka bukanlah hal yang mustahil jika suatu saat nanti nama Indonesia hanya tinggal sejarah.

REFERENSI

(DR. Agustinus W. Dewantara, S .S.,M. Hum & DR. AGUSTINUS W. DEWANTARA, S. S., M.HUM, 2017)